



**"PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL DALAM PEMBERDAYAAN
UMKM"**

(Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil UMJ Cirendeu-Ciputat)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S 1)
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

NAMA : JOHAN ISKANDAR
NPM : 2012570073

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1438 H/ 2017 M**

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	
1. Lembaga Keuangan Non Bank Syariah.....	9
2. BMT (<i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>)	12
3. Pemberdayaan UMKM.....	25
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Latar Penelitian.....	43
D. Metode dan Prosedur Penelitian	46
E. Data dan Sumber Penelitian.....	47
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	47
G. Prosedur Analisis Data	48

H. Pemeriksaan Keabsahan Data	49
1. Kredibilitas	50
2. Transferabilitas	51
3. Dependabilitas	52
4. Konfirmabilitas	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	45
B. Temuan Penelitian	58
C. Pembahasan Temuan Penelitian	63

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Euis. 2008 *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arief Sritua. 1997 *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Cetakan I Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA (Institut of Development and Economic Analisis)
- Arif Subhan, ed., Jurnal Vol. 9 No.2 2014 : *Peranan Dosen IAIN Raden Intan Lampung dalam Pemberdayaan melalui Pengabdian Masyarakat di Kec. Sukarame Bandar Lampung*. (Lampung: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, 2014).
- Arminda Yolanda Ryan. "Ini Solusi Atasi Efek Negatif Pasar Bebas ASEAN," *Tempo*, Jum^a at 15 Agustus 2014
- Baitul Maal Wa Tamwil UMJ. 2015 *Company profile KSU BMT UMJ*, Jakarta.
- Burhan Bungin, " *Tehnik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial* " dalam Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).
- Chapra. 1999 *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer* Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti dan IIIT-Malaysia
- Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memeberdayakan Rakyat:Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* Bandung: PT refika Aditama
- Fatimah Siti. 2013. *Masyarakat Berdaya: Jurnal Kajian Islam dan Pemberdayaan Masyarakat* Surabaya: PMI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel
- <http://blog-pelajaransekolah.blogspot.com/2013/12/ciri-ciri-sistem-ekonomi-pasar-bebas.html/>

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/03/29/5-hal-yang-mesti> dibenahi-
menghadapi-afta-2015-64324/

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_30.htm

International Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1

Jamal Lulail Yunus. 2009. *Manajemen Bank Syariah* Malang: UIN-Malang Press

Moeloeng Lexy J. 2002 *Metode Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosyada Karya

Muhammad Ali Daud. 1998. *Sistem Indonesia Islam Zakat dan Wakaf* Jakarta: UI
Press

Muhammad Syafi'i Antonio. 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta:
Gema Insani Press

Muhammad. 1998. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* Yogyakarta:
STIS

Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Safe'i. 2001 *Pengembangan Masyarakat
Islam* Bandung: Remaja Rosdakarya

Prabowo, Hendro dan Wardoyo. 2003. *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi
Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Wilayah Jabotabek.*
Depok : Universitas Gunadarma

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, "Strategi
Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN," Badan
Kebijakan Fiskal, Selasa, 31 Desember 2013

Qardhani Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* Jakarta: Gema
Insani Press

Rukminto Adi Ismandi. 2002. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan
Intervensi Komunitas* Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI

STAIN, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Tarbiyah*, Ponorogo: Lembaga
Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN, 2002.

Sudarsono Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan
Ilustrasi*, (Edisi Kedua) Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi
UII

Sudaryanto. 2011. *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to
Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in
East Java Farm Agribusiness.*

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* Jakarta: Alfabeta

Sukarmi. 2002. *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*
Jakarta: Sinar Grafika

Sumodiningrat Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat Yogyakarta*:
Pustaka Pelajar

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Jakarta: CV. Eko Jaya

Wangke Humphrey. 2014. "Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi
ASEAN 2015," *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*,
10 Mei 2016

Wihatnolo R.R dan Dwidjowijoto R.N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan:
Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta:
Gramedia

www.bmtuniversitasmuhammadiyahjakarta.blogspot.com/tanggal7/jam10

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johan Iskandar
NPM : 2012570073
Program Studi : Managemen Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Peran baitul maal wat tamwil dalam pemberdayaan
UMKM (Studi kasus BMT UMJ Cirendeu- Ciputat)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan Undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Jakarta, Desember 1437 H
2016 M
Yang menyatakan,

(Johan Iskandar)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama : Johan Iskandar , Nomor Pokok : 2012570073 yang berjudul **“PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (Studi Kasus Baitul Maal Wat Tamwil UMJ Cirendeu-Ciputat)“** Telah disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi : Managemen Perbankan Syariah.

Jakarta, Desember 2016

Dosen Pembimbing

Hasanah, SE.,MM

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (Studi kasus BMT UMJ Cirendeu- Ciputat)”** disusun oleh : Johan Iskandar, Nomor Pokok Mahasiswa: 2012570073 Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi : Managemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Rini Fatma Kartika,S.Ag.M.H

Nama Tanda	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika,S.Ag.M.H</u> Ketua
<u>Drs.Tajudin, MA</u> Sekretaris
<u>Hasanah,SE., MM</u> Dosen Pembimbing
<u>Drs.Asep Supyadillah, M.Ag</u> Anggota Penguji I
<u>Nurhidayat,S.Ag., MM</u> Anggota Penguji II

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Skripsi Desember 2016

Johan Iskandar

2012570073

Peran baitul maal wat tamwil dalam pemberdayaan UMKM (Studi kasus BMT UMJ Cirendeu- Ciputat)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan KSU BMT UMJ dalam memberdayakan UMKM yang termasuk dalam anggota KSU BMT UMJ, kemudian penulis memandang bahwa pembahasan tersebut perlu untuk diteliti terkait akan dampak positif yang akan di rasakan masyarakat atau pelaku usaha UMKM. Maka dari itu penulis berupaya menghadirkan apa yang di lakukan pihak lembaga terkait dalam hal ini KSU BMT UMJ terkait perannya dalam memberdayakan UMKM dan strategi-strategi menjaga eksistensi para pelaku usaha UMKM yang merupakan anggota KSU BMT UMJ. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSU BMT UMJ sangat berperan dalam memberdayakan UMKM yang telah menjadi anggota KSU BMT UMJ dengan adanya produk dan jasa layanan yang di sediakan oleh KSU BMT UMJ, dimana hal tersebut juga merupakan peran KSU BMT UMJ selain dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana penulis mendeskripsikan hasil temuan dalam penelitian hasil wawancara maupun observasi ke pihak-pihak terkait.

Kata Kunci : Baitul Maal Wat Tamwil, UMKM

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat teriring salam penulis lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh peradaban dengan cahaya.

Skripsi dengan judul *“Peranan baitul mal wa ‘tamwil (BMT) dalam pemberdayaan UMKM serta strategi menghadapi pasar bebas ASEAN (Studi Kasus Baitul Mal Wa Tamwil UMJ Cirendeu Ciputat) “* ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1). Selama Proses pembuatan skripsi ini, Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan, sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa semua ini tidak terlepas dari segala macam bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan kepada :

1. Ibu Rini Fatma Kartika S.Ag, M.H sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Bapak Nur Hidayat, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Prodi Studi Manajemen Perbankan Syariah.

3. Ibu Hasanah, S.E., M.M. sebagai Dosen Pembimbing saya, yang sangat membantu dalam penyusunan ini, semoga beliau sehat selalu dan sukses.
4. Bapak Muktiar, SE.i, M.M Selaku Pimpinan BMT UMJ dan Bapak Syaiful Bahri, S.E.,Sy. Selaku Manager Marketing beserta para Staff nya yang telah banyak sekali membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
5. Staff Dosen MPS-FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
6. Ayah dan Ibu yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini serta Kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan semangat kepada saya.
7. Teman-teman dari Managemen Perbankan Syariah Angkatan 2012 yang telah banyak memberikan masukan.
8. Kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, mudah-mudahan segala amalan mereka diterima oleh Allah SWT.

Semoga amalan baik yang telah diberikan para pihak kepada penulis diterima oleh SWT dan diberikan pahala yang berlipat ganda .dengan segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam karya ilmiah ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	
1. Lembaga Keuangan Non Bank Syariah	9
2. BMT (<i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>)	12
3. Pemberdayaan UMKM.....	25
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
C. Latar Penelitian.....	43
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	46
E. Data dan Sumber Penelitian.....	47
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	47
G. Prosedur Analisis Data	48
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	49

1. Kredibilitas	50
2. Transferabilitas	51
3. Dependabilitas	52
4. Konfirmabilitas	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	45
B. Temuan Penelitian	58
C. Pembahasan Temuan Penelitian	63

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT dimuka bumi untuk menjadi *rahmatan lil 'alamiin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.¹

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah *muamalah* yaitu hubungan dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi dan tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Setiap manusia memiliki kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan.²

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 4.

² Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

dampak negatif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, dampak negatif itu di antaranya meningkatnya pengangguran, banyaknya anak yang putus sekolah, masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan. Dampak negatif tersebut mengakibatkan krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Terutama lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia. Ekonomi Islam memandang bahwa kemiskinan identik dengan penderitaan, kesengsaraan, ketidakadilan, perputaran harta yang hanya pada sebagian golongan dan tidak produktif. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu untuk mencapai *falah* (kebahagiaan), tentunya dengan memperhatikan kemaslahatan ummat.

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia. Masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para anggotanya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam memenuhi kebutuhan.³

Salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha sadar pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasannya.

³ Yusuf Qardhani, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 32.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkannya suatu upaya pemberdayaan masyarakat untuk merubah keadaan yang lebih baik lagi. Memberdayakan masyarakat juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesatuan yang mengarahkan diri sendiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.⁴

Sebagai tujuan maka pemberdayaan masyarakat menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial⁵. Sedangkan pemberdayaan menurut Islam ialah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam.⁶

Upaya mengentaskan kemiskinan ini dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, di antaranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sektor Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Arti penting UMKM tidak terbantahkan lagi karena ia merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar perekonomian Indonesia.

⁴ http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_30.htm (diakses tgl 18 April 2017)

⁵ Siti Fatimah, ed., *Masyarakat Berdaya: Jurnal Kajian Islam dan Pemberdayaan Masyarakat* (Surabaya: PMI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 2013) h.3.

⁶ Arif Subhan, ed., *Jurnal Vol. 9 No.2 2014 : Peranan Dosen IAIN Raden Intan Lampung dalam Pemberdayaan melalui Pengabdian Masyarakat di Kec. Sukarame Bandar Lampung*. (Lampung: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, 2014) h.252.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.⁷

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka pemberdayaan UMKM menjadi sesuatu yang niscaya dan perlu dilakukan, karena melalui penguatan UMKM diyakini akan dapat dicapai pemulihan ekonomi.⁸

Tanpa akses yang tetap pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hampir seluruh rumah tangga miskin akan menggantungkan pembiayaan pada kemampuan sendiri yang sangat terbatas atau pada kelembagaan keuangan informal (rentenir) yang membatasi kelompok miskin untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari kegiatan pembangunan. Secara khusus, LKM juga dapat menjadi jalan efektif dalam membantu dan memberdayakan perempuan yang menjadi bagian terbesar dari masyarakat miskin sekaligus juga berpotensi dan

⁷ Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti. 2014. Strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi pasar Bebas ASEAN. Jurnal. ISSN NO : 1978-6522.h.17

⁸ Dr. Euis Amalia, M.Ag., *Keadilan Distributid dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: rajawali Press, 2009), h. 7.

berperan besar untuk meningkatkan ekonomi keluarga.⁹

Oleh karena itu dibentuklah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Soedjito mengungkapkan melalui BMT, masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari jeratan sistem *riba* (bunga), dan mengalihkannya kepada sistem ekonomi Islam yang disebut dengan bagi hasil. BMT mendapatkan respon positif dari masyarakat, karena BMT tergolong lebih lincah dan fleksibel, karena tidak *fully regulated*. Hal ini menyebabkan konsep BMT dapat dihadirkan di lingkungan masyarakat kecil.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi, fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dalam fungsi sosialnya BMT lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infak dan shodaqah. Sedangkan fungsi bisnis tertuju pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹⁰

Dewasa ini lembaga keuangan mikro berkembang pesat dan menjamur dimana-mana serta menawarkan berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat. Lembaga keuangan mikro baik syariah maupun konvensional kini hadir sebagai jawaban bagi masyarakat kecil untuk memperoleh bantuan modal usahanya, karena lembaga keuangan formal seperti bank tidak mampu melayani.

Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta (BMT UMJ) merupakan salah satu dari sekian BMT yang kian merebak di Indonesia, khususnya BMT tersebut berdiri di Jl. KH Ahmad Dahlan Komplek Kampus

⁹ *Ibid.*, h. 14.

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007) Edisi Kedua, h. 96

Universitas Muhammadiyah Jakarta Cirendeu-Ciputat Tangerang Selatan. Sebagaimana umumnya BMT, BMT UMJ juga sebagai lembaga keuangan mikro syariah menerima tabungan dari masyarakat untuk dikelola menjadi usaha-usaha produktif dan tepat guna bagi pengembangan ekonomi umat seperti perdagangan, argi-bisnis (pertanian), percetakan dan lain-lain. Di samping itu, BMT UMJ juga melayani pinjaman modal bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, atau membuka usaha, khususnya unit usaha ekonomi kecil.

Kehadiran BMT UMJ di Cirendeu-Ciputat Tangerang Selatan di harapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) selain sebagai lembaga alternatif penyalur modal, juga memiliki misi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi *ribawi*, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani dan berlandaskan syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk mengkaji ini dengan melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah" (Studi Kasus Baitul Maal Wat Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta Cirendeu- Ciputat)

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian terdiri dari teori yang berkenaan dengan variabel, mengingat luasnya pembahasan mengenai pemberdayaan usaha kecil mikro, maka fokus penelitian pada skripsi ini yakni aktifitas BMT dalam memberdayakan usaha mikro serta meliputi sub fokus pada penelitian antara lain : peranan BMT memberdayakan ekonomi ummat dan produk-produk pendukung fasilitas jasa keuangan ummat serta strategi BMT dalam pemberdayaan UMKM. Fokus dan Subfokus penelitian ini diharapkan agar pembahasan tidak terlalu meluas dan agar terarah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di deskripsikan tersebut, pokok masalah yang dihadapi adalah permasalahan ekonomi ummat, masih banyak masyarakat di sekitar kita yang terjerat dengan rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil.

Dengan adanya lembaga keuangan mikro BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan taraf ekonomi ummat dan membantu dalam mengembangkan usaha kecil mikro di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, adapun selanjutnya dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa peranan BMT UMJ dalam program pembiayaan usaha kecil mikro tersebut?

- b. Apa saja produk-produk pendukung pemberdayaan UMKM di KSU BMT UMJ ?
- c. Apa strategi BMT UMJ dalam memberdayakan usaha kecil mikro?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti sehingga sedikit banyak penelitian ini sebagai aplikatif dari teori yang selama ini peneliti terima dan juga tentunya menambah wawasan peneliti untuk berpikir secara kritis.

2. Bagi Instansi/ lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif bagi lembaga terkait dalam hal ini BMT UMJ sebagai pertimbangan untuk lebih meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

3. Bagi Disiplin Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu Keuangan dan Baitul Maal Wat Tamwil untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Lembaga Keuangan Non Bank Syariah

Lembaga keuangan non Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK, sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah MUI. Lembaga keuangan non bank Syariah menurut meliputi:¹

- a. Pasar Modal (capital market) Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antar para pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor) dan modal yang ditawarkan berjangka waktu panjang.
- b. Pasar Uang (money market) Pasar uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana dan modal yang ditawarkan berjangka waktu pendek.
- c. Perusahaan Asuransi Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau tabarru' yang 33 memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.

¹ Andri Soemitra, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Prenada Media, Jakarta.hal.29

- d. Dana Pensiun Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri.
- e. Perusahaan Modal Ventura Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaanperusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi.
- f. Lembaga Pembiayaan Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Lembaga yang termasuk didalam lembaga keuangan antara lain :

1) Perusahaan Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip Syariah.

2) Perusahaan Anjak Piutang (*factoring*)

Kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip Syariah 34 anjak piutang (*factoring*) dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al muwakkil*) kepada

pihak lain (al wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah).

3) Perusahaan kartu plastik

Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang pesat adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) atau disebut pula dengan kartu plastik.

4) Pembiayaan Konsumen (consumer finance) Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip Syariah.

g. Perusahaan Pegadaian

Merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan pinjaman tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman.

h. Lembaga Keuangan Syariah Mikro

1) Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ) Sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diamanahkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui BAZ 35 (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh Pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat.

2) Lembaga Pengelola Wakaf Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

3) BMT

Merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Baitul Maal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt almal wa al tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil juga biasa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah. Serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

2. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

a. Pengertian BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang kurang mampu. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dan menengah terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*).

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- 1) *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- 2) *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.²

Sebagai *Bait al-Maal*, BMT berfungsi sebagai pengemban amanah, serupa amil zakat, menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak menerima dan membutuhkan. Adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan cukup beragam. Ada yang murni sifatnya hibah dan ada juga yang merupakan pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Hibah bisa berupa bantuan langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak dan darurat bagi mereka yang sangat membutuhkan diantaranya; bantuan berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana dan lain-lainnya yang bersifat pinjaman bergulir biasa diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha.

Sebagai *Bait at-Tamwil*, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip tersebut yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil. Kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh pada syariah Islam.³

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 445.

³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 89.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

- a) Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b) Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- c) Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur, maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, berkemakmuran dan berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dari ridho Allah SWT.⁴

Salah satu tonggak penting gerakan BMT adalah didirikannya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) pada tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI, dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. PINBUK memperkenalkan serta mempopulerkan istilah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). PINBUK pula yang paling giat mendorong

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 449.

pendirian BMT di wilayah, disertai dengan bantuan teknis untuk hal tersebut.⁵

b. Prinsip BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai *Baitul Tamwil*, yaitu:

1) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2) Prinsip Jual Beli dengan Keuntungan (*Mark-up*)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin *Mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 92.

3) Prinsip non Profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qordul Hasan*.⁶

c. Peranan BMT

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah.⁷ Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non Syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti

⁶ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h.36-38.

⁷ Muhammad Ali Daud. *Sistem Indonesia Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), h.95

dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

- 1) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- 2) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- 3) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.⁸

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah:

⁸ Muhammad Ali Daud. *Sistem Indonesia Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), h.97

- a) Menjaga nilai-nilai Syariah dalam operasi BMT. Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis ta'lim atau kelompok pengajian (*usrob*).
- b) Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.
- c) Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Maka setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- d) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang bertugas sebagai pengelola, Zakat, Infaq dan Shadaqah

juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.⁹

BMT dalam pembinaan masyarakat tentunya disini bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut diatas dipahami bahwa Baitul Maal Wat tamwil ini berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pada anggota ini harus diberdayakan supaya masyarakatnya dapat mandiri. Dalam meningkatkan pembinaan BMT dimulai dalam pemberian modal pinjaman modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pinjaman. Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.¹⁰

⁹ Muhammad Ali Daud. *Sistem Indonesia Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), h.102

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta: STIS, 1998). h. 55

Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (*nasabah*) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan¹¹. Pada aturan hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (*KSU*) maupun simpan pinjam (*KSP*). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan sendiri, mengingat sistem

¹¹ Muhammad Ali Daud. *Sistem Indonesia Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), h.163

operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (*Lembaga Keuangan Mikro*) Syariah dan lain-lain.¹²

d. Kegiatan Usaha BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non- keuangan. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:

- 1) BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *mudharabah* dari anggota bentuk:
 - a) Simpanan Biasa
 - b) Simpanan Pendidikan
 - c) Simpanan Haji
 - d) Simpanan Umrah
 - e) Simpanan Qurban
 - f) Simpanan Idul Fitri
 - g) Simpanan Walimah
 - h) Simpanan Aqiqah
 - i) Simpanan Perumahan (pembangunan dan perbaikan)
 - j) Simpanan Kunjungan Wisata
 - k) Simpanan *Mudharabah* Berjangka

¹² Muhammad Ali Daud. *Sistem Indonesia Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), h. 164

- 2) Kegiatan pembiayaan atau kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
- a) Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - b) Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - c) Pembiayaan *Murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
 - d) Pembiayaan *Bai' bi Tsaman Ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
 - e) Pembiayaan *Qard al Hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BMT memiliki peluang cukup besar dalam ikut berperan mengembangkan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan di atas prinsip syariah yang lebih memberikan kesejukan dan memberikan ketenangan baik bagi para pemilik dana maupun kepada para pengguna dana.¹³

3. Pendekatan Pemberdayaan

Dalam konteks Pekerjaan Sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: *Mikro*, *Mezzo* dan *Makro*. Pendekatan *mikro* adalah, pemberdayaan dilakukan terhadap klien (Penerima Manfaat) secara

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 460.

individu melalui bimbingan, konseling, *stress management* dan *crisis intervention*.

Pendekatan *Mezzo* adalah pemberdayaan dilaku terhadap sekelompok klienm(Penerima Manfaat). Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendekatan *Makro* adalah pendekatan ini disebut sebagai strategi system besar (Large System Strategy), karena penerima manfaat perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *mikro* karena koperasi ini melakukan pemberdayaan terhadap penerima manfaat melalui bimbingan yaitu pinjaman modal. Terapi yang digunakan adalah terapi perseorangan (*casework*) yang berpusat pada klien.

Tahapan Pemberdayaan

Menurut Adi (2003) tahapan pemberdayaan yang baik adalah sebagai berikut :

a. Tahapan Persiapan (Engagment)

Pada tahap ini ada dua tahap yang harus dikerjakan yaitu, *pertama*, menyiapkan petugas atau tenaga pemberdaya masyarakat yang bisa juga dilakukan oleh *Community Worker* hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim mengenai pendekatan apa yang akan dipilih, penyiapan petugas lebih diperlukan lagi bila dalam proses pemberdayaan masyarakat tenaga yang dipilih memiliki latar belakang antar satu sama lain seperti : pendidikan, agama, suku dan strata. *Kedua*, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non direktif.

b. Tahapan Pengkajian (Assesment)

Proses pengkajian dapat dilakukan secara individu melalui tokoh-tokoh masyarakat, tetapi juga dapat melalui kelompok-kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien atau lebih tepatnya jika menggunakan teori SWOT dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman.

c. Tahapan Perencanaan Alternative Program atau Kegiatan

Tahap ini petugas sebagai agen perubah secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara menghaddapinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dilakukan.

d. Tahapan Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis.

e. Tahapan Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.

f. Tahapan Evaluasi

Sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

g. Tahap Terminasi

Tahap pemutusan secara formal dengan komunitas sasaran diharapkan petugas tidak meninggalkan komunitas secara tiba-tiba walau proyek harus segera berhenti. Petugas harus tetap melakukan kontak meski tidak rutin. Kemudian secara perlahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.¹⁴

4. Pemberdayaan UMKM

a. Pengertian UMKM

Pengertian industri kecil di Indonesia masih sangat beragam. Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia misalnya mendefinisikan industri kecil berdasarkan nilai asetnya. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksud dengan industri kecil adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari 600 juta. Sedangkan yang dimaksud industri kecil oleh kadin adalah usaha industri yang memiliki modal kerja kurang dari 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp 600 juta.¹⁵

Berbeda dari ketiga batasan tersebut karakter usaha kecil dan menengah di Indonesia masih beragam dan tergantung dari konsep yang digunakan industri Usaha Kecil masih identik lemah.

Kriteria usaha kecil di Indonesia berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan di instansi yang berkaitan dengan

¹⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Jakarta: FISIP UI Press, 2004), h. 56

¹⁵ Sritua Arief. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA (Institute of Development and Economic Analysis), 1997 cetakan 1, hlm. 48

sektor ini. Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten sejak tahun 1974 menggunakan pedoman jumlah tenaga kerja dalam mendefinisikan usaha kecil bilamana suatu usaha menggunakan jumlah tenaga kerja antara 5 dan 19 orang dikategorikan sebagai Usaha Kecil. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang mempekerjakan kurang dari lima orang.¹⁶

Dalam UU RI Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bab 1 pasal 1 yang dimaksud dalam UU ini adalah¹⁷:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil dan Usaha besar dengan jumlah kekayaan

¹⁶ Ibid, hlm. 48

¹⁷ Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Jakarta: CV. Eko Jaya, 2008, hlm. 4

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.¹⁸
- 5) Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 6) Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
- 7) Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, kecil dan Menengah melalui

¹⁸ Ibid, hlm. 5

pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- 8) Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar.¹⁹

Asas dan Tujuan Bab II pasal 2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan:

- a) Kekeluargaan.
- b) Demokrasi Ekonomi.
- c) Kebersamaan.
- d) Efisiensi berkeadilan.
- e) Berkelanjutan.
- f) Berwawasan Lingkungan.
- g) Kemandirian.
- h) Keseimbangan Kemajuan.

Pasal 3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.²⁰

¹⁹ Ibid, hlm. 6

²⁰ Ibid, hlm. 7

Prinsip dan Tujuan Pemberdayaann bagian kesatu pasal 4 Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dan berprakarsa sendiri.
- b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntable dan berkeadilan.
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.²¹

Bagian dua Tujuan pemberdayaan Pasal 5 Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kriteria Usaha Mikro dalam Bab IV Pasal 6

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

²¹ Ibid, hlm. 7

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).²²
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 4) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, huruf b dan

²² Ibid, hlm. 8

ayat 2 huruf a, huruf b serta ayat 3 huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.²³

b. Jenis-jenis Usaha Kecil dan menengah

Menurut Soetrisno P.H., yang dirujuk oleh Edillius dkk. Jenis-jenis UKM di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri dari:

- 1) Sektor Koperasi
- 2) Sektor Negara
- 3) Sektor Swasta, yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Usaha Perorangan dan Perusahaan Internasional.

Jika ditinjau berdasarkan bentuk produksinya, terbagi atas:

- a) Perusahaan Industri.
- b) Perusahaan Niaga.
- c) Perusahaan Agribisnis.
- d) Perusahaan Jasa.
- e) Perusahaan Ekstratif.
- f) Perusahaan Kredit.

Jika ditinjau berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab pemilik terhadap utang-utang perusahaan, maka perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalam bentuk ini adalah perusahaan

²³ Ibid, hlm. 9

perorangan dan Firma.

- b) Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalam perusahaan ini adalah Perseroan Terbatas.²⁴

c. Strategi Pengembangan UKM

Dengan latar belakang seperti tindakan yang harus dilakukan untuk memacu perkembangan industri kecil dimasa datang, sebagaimana diketahui perekonomian Indonesia dimasa datang akan ditandai oleh berlangsungnya era perdagangan bebas. Dalam era penuh kompetisi itu, tiap-tiap perusahaan akan dipaksa untuk mengembangkan keunggulan kompetitifnya. Perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif akan dipaksa untuk menyingkir dari pasar. Dengan demikian, perdagangan bebas sebenarnya tidak hanya merupakan tantangan industri kecil, dan juga merupakan tantangan industri menengah dan besar.²⁵

Tantangan yang dihadapi industri kecil sebagian besar akan berasal dari dalam lingkungannya sendiri. Sebagaimana dikemukakan tadi, kelemahan industri kecil terutama melekat pada ciri-ciri umum yang dimilikinya, yaitu berupa kelemahan manajerial. Kelemahan lain seperti skala ekonomi yang terbatas atau margin keuntungan yang tipis, lebih banyak merupakan akibat dari kondisi persaingan antar sesama industri kecil yang memang tergolong sangat ketat.²⁶

²⁴ Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia,⁵ (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 47

²⁵ Sritua Arief, op., cit., hlm. 51

²⁶ Ibid hlm. 52

Adapun tantangan eksternalnya, sebagian diantaranya justru akan berasal dari kemitraan yang dibangunnya dengan industri menengah dan besar.²⁷ Karena itu, salah satu langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mengembangkan industri kecil adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Para pengelola industri kecil perlu meningkatkan menejerialnya. Sedangkan para pekerja industri kecil dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjamin standar kualitas pekerjaannya. Dengan demikian, dalam mengembangkan SDM industri kecil inilah peranan Departemen Perdagangan, Perindustrian serta Departemen Koperasi dan PKK, akan sangat diharapkan.²⁸

2. Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.²⁹

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan masyarakat berarti melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang identik dengan pembangunan yang berarti perubahan kemajuan atau *progress* yaitu

²⁷ Ibid hlm. 53

²⁸ Ibid hlm. 54

²⁹ Randy R Wihatnolo dan Rian Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 75.

peningkatan bidang-bidang kehidupan yang memang diarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Pemberdayaan identik pula dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia, yang tidak sekedar membentuk manusia profesional dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan sistem untuk dapat memberikan kemampuan (*power*) manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang ada.³⁰

Pemberdayaan merupakan upaya yang dimulai dengan menciptakan diri mereka memperoleh akses yang paling mudah, serta dengan cara yang cepat guna untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya itu dengan mendorong, memotivasi, yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Sedangkan pemberdayaan menurut Islam ialah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam.³¹ Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara pemberdayaan:

- a. Pemberdayaan menurut Ife bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan menurut Parsons adalah sebuah proses dengan mana orang-

³⁰ Siti Fatimah, ed., *Masyarakat Berdaya: Jurnal Kajian Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Surabaya: PMI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 2013) h.3.

³¹ Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 29.

orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

- c. Pemberdayaan menurut Swift dan Levin menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan menurut Rappaport adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah

proses.^{32\}

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan, yaitu:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini di dalamnya tahap (a) penyiapan petugas dan (b) penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini adalah sebagai tenaga *community worker*, merupakan prasyarat suksesnya suatu pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tahap penyiapan lapangan, petugas (*community worker*) melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal.

2) Tahap *Assessment*

Proses *assessment* yang dilakukan di sini dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Di samping itu dalam proses penilaian (*assessment*) ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat Kekuatan (*Strenght*), Kelemahan (*Weaknesses*), Kesempatan (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threat*). Dalam proses *assessment* ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas (*community worker*) secara partisipatif

³² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memeberdayakan Rakyat:Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung: PT refika Aditama, 2005), h. 59-60.

mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.

4) Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan (*community worker*) membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana. Dalam tahap ini diharapkan *community worker* dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

5) Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan.

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga. Jadi kerja sama antar sesama sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan.

6) Tahap Evaluasi.

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan ada pemberdayaan

masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Evaluasi itu sendiri dapat dilakukan pada input, proses pemantauan (*monitoring*) dan juga pada hasil.

7) Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Tahap ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam keberlanjutan program, agar tidak ada timbulnya ketergantungan terus-menerus. Meskipun demikian *community worker* tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin.³³

5. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai acuan yang berhubungan dengan penelitian, antara lain :

Randhi Rukmana dan Nur S Buchori melakukan penelitian yang berjudul “Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Perberdayaan Usaha Mikro” yang diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam Vol 2, No 1 (2014), ISSN: 23551755, Hal 53-71.

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan interview sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data sekunder. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BMT sangat strategis dan KJKS BMT hanya memprioritaskan pada pembiayaan produktif agar

³³ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2002), h. 174-178.

secara tidak langsung masyarakat akan belajar memahami system ekonomi syariah dan mampu membedakannya dengan system konvensional (system bunga). Terdapat beberapa kesuksesan BMT dalam menyalurkan dananya demi terwujudnya misi pemberdayaan usaha mikro, yaitu letak BMT yang sangat strategis yaitu dekat dengan pasar dan banyak pelaku usaha mikro di daerah tersebut. Dan yang menjadi kendala adalah kredit macet dan sulitnya mencari nasabah yang produktif.

Sri Dewi Yusuf juga melakukan penelitian yang berjudul “Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Ekonomi 13 Rakyat”, yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Mizan, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014, hal 69-80.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui upaya dan peran BMT dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BMT telah membuahkan hasil yang cukup signifikan, dimana BMT mampu berperan aktif dalam membantu memberdayakan perekonomian para pelaku ekonomi lemah.

Endah Wartingsih dan Tuty Herawati (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Peran BMT dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kecil (Studi kasus BMT As-Salam, Beji Timur, Depok)”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran BMT terhadap masyarakat sekitarnya.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa diperoleh kesimpulan keberadaan BMT sangat dibutuhkan pedagang kecil sebagai nasabah BMT, para pedagang di

wilayah Beji Timur sangat terbantu dengan keberadaan BMT ini. Hal ini dilihat dengan meningkatnya jumlah pembiayaan di BMT AsSalam.

Novada Mahardi Putra (2012), melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul “Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bmt Beringharjo Cabang Ponorogo”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus deskriptif. Pengumpulan data dengan metode partisipatif dan wawancara mendalam terhadap informan. Teknik analisis yang digunakan 14 adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah BMT Beringharjo cabang Ponorogo sudah memberdayakan pengusaha UMKM yang menjadi nasabahnya. Pemberdayaan tersebut berupa pelatihan, pendampingan, dan pembinaan secara informal, serta pemberian pembiayaan. Pengusaha UMKM setelah mendapat pembiayaan dari BMT Beringharjo cabang Ponorogo mengalami perkembangan bisnis lebih baik ditinjau dari pemasaran, keuangan, teknologi, manajemen, administrasi, akuntansi, serta modal dan pendapatan.

Penelitian selanjutnya untuk melengkapi secara komprehensif, untuk BMT di Indonesia diharapkan mengadakan pelatihan secara formal. Hardianto Ritonga melakukan penelitian yang berjudul “Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (Studi Kasus Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Amanah Ummah sudah berperan aktif dalam memberdayakan UMKM dimasyarakat Surabaya. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui tiga hal yaitu: memberikan pembiayaan

kepada pedagang kecil, melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan seperti pemasaran produk/jasa kepada masyarakat.

Era Ikhtiani Rois (2010) juga melakukan penelitian yang berjudul “Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Pasar Gesikan, Ngluwar, Magelang”.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil dari penelitian ini 15 menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Barokah melalui optimalisasi dana ZIS, dengan memberikan bantuan melalui pembiayaan-pembiayaan dan bantuan pendidikan bagi para siswa TK, SD, MTS sampai SMK melalui beasiswa. Dari beberapa penelitian yang diungkapkan di atas pada dasarnya penelitian tersebut bertujuan untuk mengupayakan penyaluran dana melalui pembiayaan secara maksimal dengan berbagai macam bentuk program dalam memanfaatkan dana yang dikelola bagi pengusaha kecil atau masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana dampak dari manfaat penyaluran dana tersebut dalam mensejahterakan masyarakat.

Jadi terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan penulis. Persamaan tersebut di antaranya:

1. Lembaga yang akan diteliti, yaitu BMT
2. Objek yang dikaji, yaitu pembiayaan terhadap sektor produktif

Sedangkan perbedaannya adalah :

1. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada studi kasus yang terkait dengan usaha pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil
2. Dalam penelitian ini fokus peneliti adalah pada optimalisasi peran BMT, jadi bagaimana pihak BMT dalam mengoptimalkan pembiayaannya

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan diatas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran BMT UMJ memberdayakan UMKM
2. Untuk mengetahui produk dan jasa layanan BMT UMJ terhadap UMKM
3. Untuk mengetahui strategi BMT UMJ dalam memberdayakan UMKM

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada BMT UMJ Cirendeu Tangerang Selatan sebagai studi kasus penelitian ini. Waktu pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data sebagai bahan penelitian di targetkan selama dua bulan dari beberapa sampel yang diperlukan.

C. Latar Penelitian

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi . Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah

keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*) dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.¹

Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen dan sektor usaha menengah 14,7 persen melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1 persen PDB melalui pembayar pajak (BPS, 2011).

Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global.

¹ Sudaryanto. 2011. *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness*. International Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1 h. 56-67

Laporan *World Economic Forum* (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada *ranking* ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan

perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building* dan pengembangan *information technology* (IT).

Demikian juga upaya-upaya lainnya dapat dilakukan melalui kampanye cinta produk dalam negeri serta memberikan suntikan pendanaan pada lembaga keuangan mikro. Keuangan mikro telah menjadi suatu wacana global yang diyakini oleh banyak pihak menjadi metode untuk mengatasi kemiskinan (ref). Berbagai lembaga multilateral dan bilateral mengembangkan keuangan mikro dalam berbagai program kerjasama. Pemerintah di beberapa negara berkembang juga telah mencoba mengembangkan keuangan mikro pada berbagai program pembangunan. Lembaga swadaya masyarakat juga tidak ketinggalan untuk turut berperan dalam aplikasi keuangan mikro.²

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari lembaga yang terlibat dalam objek penelitian.³ Jenis pelaporan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

² Prabowo, Hendro dan Wardoyo. 2003. *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Wilayah Jabotabek*. Depok : Universitas Gunadarma, h. 90

³ Moeloeng Lexy J, *Metode Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada Karya, 2002), h. 9.

Proses analisa dimulai dari membaca, mempelajari dan menelaah data yang didapat secara seksama, selanjutnya dari proses analisa tersebut penulis mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus.

E. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat tektual berupa konsep dan tulisan. Aspek-aspek yang akan diteliti adalah seputar apa dan bagaimana definisi, konsep, persepsi, pemikiran dan argumentasi yang terdapat di dalam literatur yang relevan dengan pembahasan. Oleh karena itu, data yang akan diambil dan dikaji berasal dari data verbal yang abstrak kualitatif. Sedangkan data yang digunakan antara lain :

1. Data Primer

Sumber data primer, ialah sumber data yang diperoleh melalui pengamatan dan analisa terhadap literatur-literatur pokok yang dipilih untuk dikaji kembali kesesuaiannya antara teks dengan realitas berdasarkan berbagai macam tinjauan ilmiah.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, ialah sumber data yang di peroleh dari sumber-sumber bacaan yang mendukung sumber primer yang di anggap relevan, hal tersebut sebagai penyempurnaan bahan penelitian terhadap bahasan dan pemahaman peneliti

F. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

Literatur itu berupa buku, majalah, surat kabar, artikel, internet, dan lain sebagainya. Langkah dalam melaksanakan studi pustaka ini adalah dengan cara membaca, mengutip, serta menganalisa dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data dalam penelitian ini.

- b. Penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dan informasi, penulis langsung terjun ke objek penelitian yaitu lembaga yang diteliti, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Interview yaitu melakukan wawancara dengan pihak BMT UMJ yang menangani masalah pemasaran dan pembiayaan UMKM.

1. *Dokumentasi* yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari lembaga yang diteliti dan laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

G. Prosedur Analisis Data

Analisa data secara umum di lakukan dengan cara menghubungkan apa yang di peroleh dari suatu proses kerja awal. hal ini di tujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, yang kemudian untuk di ketahui kerangka berfikir peneliti.

Adapun metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Analisis Reflektif

Metode analisa data yang berpedoman pada cara berfikir reflektif. Pada dasarnya metode ini adalah kombinasi yang kuat antara berfikir deduktif dan

induktif atau dengan mendialogkan data teoritik dan data empirik secara bolak balik kritis.⁴

Dalam metode analisa ini peneliti akan memecahkan masalah dengan pengumpulan data-data dan informasi untuk di bandingkan kekurangan dan kelebihan dari setiap literatur atau alternatif tersebut. sehingga pada penyimpulan akan di peroleh data yang rasional dan ilmiah.

2. Content Analisis

Content analisis atau disebut dengan analisis isi, tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Dengan pertimbangan bahwa analisis isi berangkat dari anggapan dasar ilmu-ilmu sosial, dan bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi ilmu sosial.⁵ Mekanisme analisis data dengan menggunakan tehnik analisis isi ini, antara lain menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data dengan kriteria-kriteria tertentu, dan melakukan prediksi.⁶

Jadi peneliti dalam metode ini akan menganalisa data berdasarkan fenomena yang terjadi dalam peranan BMT memberdayakan UMKM.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan data meliputi 1) uji kredibilitas data, 2) uji transferabilitas, 3) uji dependabilitas, 4) uji konfirmabilitas. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji,

⁴ *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Tarbiyah*, Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN,2002, hlm.21

⁵ Burhan Bungin, “ *Tehnik Analysis Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial* ” dalam Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal 84

⁶ *Ibid*.hal.85

credibility (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

1. Kredibilitas

Namun yang lebih utama adalah uji kredibilitas data yakni dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan referensi lain, dan member check.

- a. Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji data yang ada, maka dilakukan pada direktur BMT, divisi marketing BMT dan anggota binaan (UMKM). Dari tiga sumber data tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian diminta kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.
- b. Triangulasi teknik dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara akan dicek dengan teknik observasi, dokumentasi. Bila dengan berbagai teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan yang dianggap benar.
- c. Triangulasi waktu dalam pengujian kredibilitas data dilakukan melakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, obeservasi atau teknik lain

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila dengan waktu yang berbeda dan berulang-ulang maka akan ditemukan kepastian data.

Selain triangulasi, uji kredibilitias yang lain adalah menggunakan bahan referensi yang mendukung, seperti hasil wawancara didukung oleh adanya rekaman wawancara. Kemudian interaksi sosial dengan foto-foto yang mendukung, dan lain-lain.

Selanjutnya uji kredibilitas yang dipakai yaitu member check, yaitu dari data yang diperoleh maka dikonfirmasi baik kepada individu yang bersangkutan atau kelompok diskusi pemberi data untuk melihat mana data yang disepakati dan mana yang ditolak. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani, supaya lebih otentik, sehingga dapat dijadikan bukti bahwa peneliti telah melakukan member check.

2. Transferabilitas

Selanjutnya pengecekan keabsahan data juga dilakukan dengan uji transferabilitas. Transferabilitas dalam penelitian kualitatif adalah nilai transfer yang bergantung pada si pemakai. Oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

Sehingga pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.⁴

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 366.

3. Dependabilitas

Pengecekan keabsahan data selanjutnya adalah uji dependabilitas, yaitu audit yang dilakukan oleh pembimbing, yaitu Hasanah, ME dalam hal ini pembimbing skripsi peneliti, untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Konfirmabilitas

Pengecekan keabsahan data selanjutnya adalah konfirmabilitas, yaitu menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Penelitian

1. Sejarah singkat BMT UMJ

Pendirian Koperasi BMT-UMJ diawali dengan rapat pembentukan oleh 36 (tiga puluh enam) orang sekitar awal bulan April 2008. Selanjutnya, Akta Pendirian Koperasi BMT-UMJ dengan nomor 69 diterbitkan tgl. 14 April 2008 oleh Notaris yang ditunjuk Kementerian Koperasi dan UKM, H. Rizul Sudarmadi, SH. Setelah itu, Kementerian Koperasi dan UKM, tgl. 6 Juni 2008 mengesahkan Akta Pendirian dan sekaligus memberikan nomor badan hukum : 770/BH/Meneg./I/VI/2008. Dalam rangka mempersiapkan operasionalisasi Koperasi BMT-UMJ, maka pada awal bulan Mei 2008 selama sebulan penuh tiga orang calon karyawan terseleksi telah melaksanakan proses magang di BMT Mujahidin dan BMT Al Munawarah. Kemudian, mulai awal bulan Juni 2008, semua persiapan launching kegiatan Koperasi BMT-UMJ sudah dimulai. Saat ini, Koperasi BMT-UMJ menempati ruangan seluas kurang lebih 12 m² di lantai dasar samping gedung Rektorat UMJ dengan no. telepon (Flexi) 021-32425400. Perangkat kerja relatif sudah cukup tersedia, mulai dari blanko/formulir untuk berbagai jenis transaksi sesuai produk yang akan

ditawarkan, sampai dengan brankas dan tiga buah komputer beserta dua buah printer.¹

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Modal Koperasi BMT-UMJ terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Luar. Modal Sendiri terbagi atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Cadangan, Donasi, dan Hibah. Modal Luar atau Modal Pinjaman berasal dari Anggota, Anggota Luar Biasa, Calon Anggota, koperasi lain, lembaga keuangan (bank dan non bank) dan sumber-sumber lain yang sah.²

Per tanggal 18 Juni 2008, permodalan Koperasi BMT-UMJ yang tersedia adalah sebesar Rp. 117 juta. Permodalan dimaksud terdiri atas Modal Sendiri yang berasal dari Simpanan Pokok 10 orang anggota/pendiri sebesar Rp. 42 juta dan Modal Pinjaman dalam bentuk Modal Penyertaan sebesar Rp. 75 juta yang berasal dari empat orang anggota/pendiri.³

Aspek Legalitas :

- a. Badan hukum : 770/BH/MENEG.1/VI/2008
- b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan : 128/1.824.5/V/2008.
- c. NPWP : 02.836.276.2-024.000
- d. Surat Keterangan Terdaftar :PEM01805/WP/J.06/KP.0603/2008
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 09.05.2.51.00754
- f. SIUP : 1.070/1.824.51

¹ Mukhtiar Manager Marketing BMT UMJ, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 14 September 2016

² Mukhtiar Manager Marketing BMT UMJ, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 14 September 2016

³ www.bmtuniversitasmuhammdiyahjakarta.blogspot.com/tanggal7/jam10

Alamat Kedudukan:

Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl Cempaka Putih Tengah No 27,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Alamat Kantor Operasional:

Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KH. Ahmad Dahlan,
Cirendeu-Ciputat, Tangerang Selatan Tlp.021-32425400, 02174706220; Fax
021-7441434; e-mail: umj.bmt@gmail.com

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan, KSU-BMT
UMJ mengembangkan budaya kerja dengan komitmen kepada :

- a. Menciptakan rasa Loyalitas yang tinggi, sehingga tercipta rasa saling memiliki.
- b. Menciptakan rasa Empati/peduli yang tinggi kepada Lembaga, Anggota dan Pengelola.
- c. Pengelolaan Lembaga yang Bersih dan Amanah.
- d. Menciptakan suasana kerja yang Harmonis, Nyaman dan kondusif guna meningkatkan kinerja sumberdaya manusia.
- e. Memberikan pelayanan kepada Anggota untuk dapat Mandiri, dengan rasa Aman, Disiplin dan menjadikan yang Utama.⁴ (Kesemuanya terangkum dalam BUDAYA KERJA LEBAH yang menghasilkan MADU)

⁴ www.bmtuniversitasmuhammdiyahjakarta.blogspot.com/tanggal7/jam10

2. Visi Dan Misi Baitul Maal Wat Tamwil UMJ

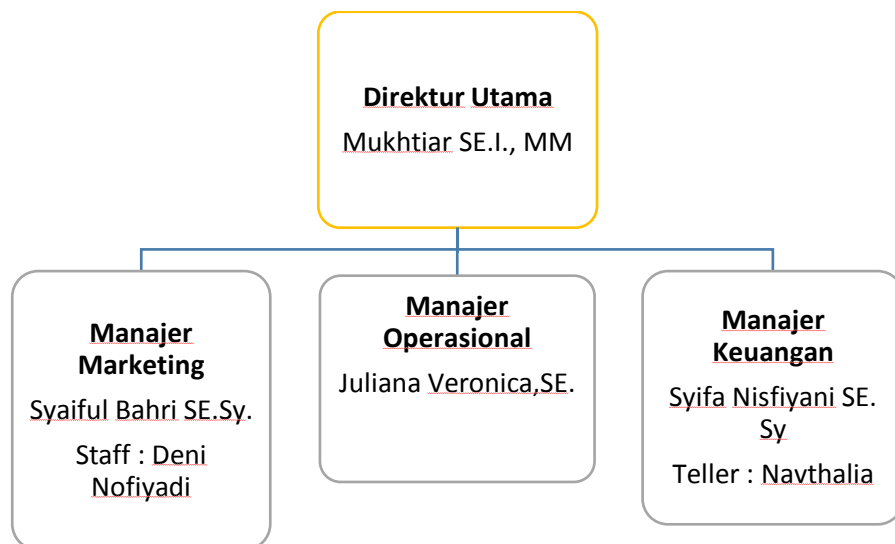
Visi :

Membangun Koperasi Jasa Keuangan terkemuka, modern, dan Islami dalam mengembangkan ekonomi rakyat.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya insani yang bermartabat dan mandiri.
- b. Memperjuangkan peningkatan harkat social ekonomi anggota dan karyawan koperasi serta masyarakat
- c. Mengelola portofolio bisnis anggota dengan semangat kekeluargaan dan berdaya saing.⁵

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengelola KSU BMT UMJ

⁵ www.bmtuniversitasmuhammdiyahjakarta.blogspot.com/tanggal7/jam10

4. Program Unggulan Baitul Maal Wat Tamwil UMJ

a. Beasiswa Pendidikan Sekolah⁶

Alhamdulillah sampai saat ini KSU BMT UMJ sudah memiliki 12 anak asuh (dhuafa/yatim piatu) untuk bisa terus meningkatkan pendidikan yang lebih baik.

Adapun rincian yang menjadi anak asuh BMT UMJ adalah:

2 orang anak didik usia TK

8 orang anak didik usia SD

1 orang anak didik usia SMP

1 orang anak didik usia SMA



Gambar 4.1 Anak Asuh KSU BMT UMJ

b. Pengembangan TK/ TPA⁷

Program pengembangan TK/ TPA yang BMT UMJ lakukan adalah Memberi bantuan operational kepada TK/TPA. Memberi fasilitas jasa keuangan syariah kepada dewan guru TK/TPA dengan mudah dan murah, Memberi beasiswa kepada santriwan/ti yang berprestasi, Dsb.

c. Santunan Anak Yatim Piatu⁸

Program santunan anak yatim yang KSU BMT-UMJ lakukan selama ini, dalam bentuk bingkisan peralatan sekolah,



Gambar 4.2 Santunan Yatim Piatu KSU BMT UMJ

⁶ Company profile KSU BMT UMJ

⁷ Company profile KSU BMT UMJ

⁸ Company profile KSU BMT UMJ

makanan, dan juga santunan yang diharapkan dapat membantu meringankan orang tua wali si anak yatim piatu tsb.

d. Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa⁹

Program Pemberdayaan perekonomian dhuafa biasa kami lakukan seiring dengan pengembangan wilayah cluster UKM, dari hal tersebut kami memberi bantuan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki potensi untuk usaha namun tidak memiliki modal, dan bentuk bantuan kami berupa pinjaman qord, dan pelatihan usaha yang berkesinambungan.



Gambar 4.3
Pemberian Bantuan
Usaha KSU BMT
UMJ

B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan tahap yang bermanfaat untuk menelaah data yang telah di peroleh dari beberapa informan yang telah di pilih selama penelitian berlangsung. Selain itu juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian. Analisis data ini telah dilakukan sejak awal dan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Adapun dari penelitian yang telah di lakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat menggambarkan peran pemberdayaan dan respon anggota KSU BMT UMJ yang terlihat dari hasil wawancara dan observasi di mana proses pemberdayaan UMKM dan respon baik dari anggota KSU BMT UMJ terjadi di dalam operasional KSU BMT UMJ. Secara teknis, proses pemberdayaan yang dilakukan oleh KSU BMT UMJ terhadap pelaku UMKM seperti mengadakan bimbingan

⁹ Company profile KSU BMT UMJ

modal usaha yang ditawarkan dalam bentuk pembiayaan usaha anggota KSU BMT UMJ, serta terkait dengan temuan penelitian melalui hasil questioner yang di sebar ke beberapa anggota KSU BMT UMJ yang sedang atau pernah menggunakan jasa pembiayaan modal usaha mendapat respon yang tinggi baik dari segi pelayanan maupun produk-produk yang ditawarkan.

Merujuk pada hasil penyajian data yang peneliti sajikan pada sub fokus sebelumnya. Saat ini secara mendetail dan sistematis dapat peneliti sampaikan temuan-temuan apa saja yang di peroleh dari hasil penyajian data tersebut, dengan fokus penelitian.

1. Peranan KSU BMT UMJ memberdayakan ekonomi ummat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.¹⁰ Dalam hal ini pemberdayaan dilakukan demi untuk kepentingan pihak yang diberdayakan bukan kepentingan orang yang memberdayakan atau mencari keuntungan demi kepentingan sendiri.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam

¹⁰ Randy R Wihatnolo dan Rian Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 75.

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.¹¹

Peranan BMT UMJ dalam memberdayakan ekonomi umat juga dapat mencakup beberapa point antara lain menurut Michael Sheraden (2006) mengatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat setidaknya mencakup tiga bidang pemberdayaan yaitu:¹²

- a. Aset manusia (human asset) berkaitan erat pada pemberdayaan kualitas sumber daya manusianya. Human capital ini termasuk pada golongan aset tidak nyata. Human asset secara umum meliputi intelegensia, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, ketempilan, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk meningkatkan human asset ini biasanya dilakukan dengan berbagai program yang bersifat kualitatif seperti program pelatihan dan keterampilan dalam bentuk kursus-kursus, penyuluhan, yang kesemuanya bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya menghasilkan output pada peningkatan kualitas SDM.

¹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memeberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung: PT refika Aditama, 2005), h. 59-60.

¹² Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Desa Bojong Indah, Parung* (Jakarta: Dakwah Press, 2008) h. 226

- b. Pemberdayaan asset modal keuangan (finanssial asset), meliputi modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi, dan komponen produksi lainnya. Salah satu permasalahan klasik yang dihadapi para pelaku perekonomian adalah sulitnya mendapatkan modal untuk kredit usaha. Ketidakmampuan dan ketidakpastian mereka dalam memenuhi setiap persyaratan yang diajukan oleh lembaga keuangan formal seperti bank menjadikan sulitnya dana usaha terealisasi. Para penguaha kecil pada umumnya tidak memiliki asset yang cukup untuk menjaminkan kepada pihak bank.
 - c. Pemberdayaan asset sosial (sosial asset). Asset sosial meliputi keluarga, teman, koneksi atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan emosional, informasi dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan, kredit dan tipe aset lainnya.
2. Produk-produk pendukung pemberdayaan UMKM

Produk-produk pendukung pemberdayaan UMKM di KSU BMT UMJ meliputi simpanan syariah dan pembiayaan syariah. Produk dan layanan tersebut di harapkan dapat membantu kestabilan ekonomi UMKM dalam mengatur keuangan.

3. Strategi KSU BMT UMJ memberdayakan UMKM

KSU BMT UMJ dalam aktifitasnya membangun perekonomian umat sering melibatkan anggota KSU BMT UMJ dalam beberapa agenda pelatihan keterampilan demi mengembangkan potensi yang dimiliki anggota. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kinerja UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Dalam pembinaan karakteristik masyarakat juga perlu di perhatikan perihal tingkah laku dan peran dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Hasil yang ingin di capai dalam suatu bimbingan karakteristik pembisnis dalam beberapa kegiatan yang dilakukan KSU BMT UMJ tak lepas dari beberapa hal, antara lain :

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, tempat hiburan, dan lain-lain. Tingkat mobilitas ini di anggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan individu maupun keluarga sehari-hari. Seorang dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
- c. Kemampuannya membeli komoditas besar: kemampuan individu membeli komoditas atau barang-barang sekunder atau tersier, seperti TV, berlangganan koran, dan lain-lain.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama pasangan mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
- f. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki rumah, tanah, aset produktif.¹³

¹³ Edi Suharto, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, h. 64-66

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana peran BMT terhadap keberadaan UMKM, yang kedua bagaimana strategi BMT memberdayakan UMKM. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh beberapa penjelasan melalui analisis konsep terhadap pelaksanaan BMT.

1. Peranan KSU BMT UMJ memberdayakan ekonomi umat

Gambaran masyarakat madani yang diidentikan dengan masyarakat serba cukup, maju dan mampu dalam menghadapi setiap problematika perkembangan zaman, disejajarkan dengan masyarakat moderen senantiasa dicita-citakan oleh masyarakat yang tidak ingin dikatakan sebagai masyarakat yang tertinggal dan terbelakang. Perwujudan masyarakat yang diharapkan adalah adanya realisasi keadilan dan kemakmuran, sehingga jika mengacu kepada Negara Indonesia yang mencita-citakan pada realisasi masyarakat yang adil dan makmur adalah adanya pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, dengan cara meningkatkan komsumsinya. Peningkatan konsumsi sangat tergantung kepada peningkatan pendapatan, dan peningkatan pendapatan sangat tergantung pada peningkatan produksi, maka sebagai pelaku ekonomi setiap anggota masyarakat selayaknya turut serta dalam proses pembangunan.¹⁴

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk mendukung keterjaminan, kesempatan, dan keberdayaan melalui¹⁵:

¹⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 3.

¹⁵ Edi Suharto, *Analisis Jaringan Sosial*, h.2

- a. Pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan social
- b. Penguatan akuntabilitas dan inklusifitas kelompok-kelompok masyarakat
- c. Peningkatan partisipasi berbasis luas
- d. Perluasan akses masyarakat terhadap informasi dan jaringan social
- e. Penyempurnaan pemerintah, lembaga dan kebijakan pada skala local dan nasional sehingga responsive terhadap kebutuhan masyarakat local.

Adapun target pengembangan masyarakat/peningkatan kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan atau *empowerment* agar anggota masyarakat terlibat dalam proses produktif yang didasarkan pada kesetaraan atau *equity*, keterjamanan dan *security*, keberlangsungan atau *sustainability*, dan kerjasama atau *cooperation*, bila pemberdayaan atau kesetaraan, keterjaminan, keberlangsungan dan kerjasama dapat berjalan secara simultan maka sasaran kesejahteraan dapat tercapai.¹⁶

Jadi inti pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah mengarahkan dan mendorong perubahan structural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, pelaku ekonomi masyarakat mampu menikmati yang dihasilkannya dan seterusnya mampu menghasilkan dan bermanfaat serta berkelanjutan.

BMT adalah *Baitul Maal Wat Tamwil*, suatu gerakan swadaya masyarakat. Masyarakat dibidang ekonomi sejak awal kehadirannya fokus untuk melayani kebutuhan finansial UMK. Dimulai

¹⁶ Asep Usman Ismail Dkk, *Pengembangan Komunitas Muslim; pemberdayaan Masyarakat kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit*, (Jakarta: Dakwah Press, 2007), h.54.

sejak tahun 1992 yang merupakan respon atas kemiskinan dan pengangguran serta kurangnya permodalan dan pendampingan terhadap para pengusaha mikro dan kecil khususnya pedagang kaki lima. Dengan adanya permodalan dari lembaga-lembaga, maka dari itu sebagai peran pendamping atau usaha untuk mendapatkan modal, Universitas Muhammadiyah di sini sangat berperan penting sebagai lembaga yang mendampingi BMT UMJ, bahkan sebagai tolok ukur dari BMT tersebut.¹⁷

BMT UMJ adalah Baitul Maal Wat Tamwil yang berbadan hukum Koperasi mampu mengatasi kendala-kendala yang dimiliki lembaga keuangan formal seperti Bank. BMT ini jugalah yang telah menyeleamatkan banyak usaha mikro dan pedagang kaki lima dari cengkaman lintah darat. Kedudukan BMT ini dalam struktur keuangan mikro di Indonesia merupakan lembaga keuangan mikro *non bank-non formal*.¹⁸

2. Produk-produk pendukung pemberdayaan UMKM

KSU BMT UMJ melalui produk-produk dan jasa keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat diharapkan menjadi pendukung kemajuan ekonomi ummat. Berbagai program pemberdayaan (pembiayaan immaterial) seperti permodalan usaha qordul hasan sampai program beasiswa dapat membantu kesulitan perekonomian yang ada pada masyarakat kecil menengah.¹⁹

¹⁷ Mukhtiar Direktur BMT UMJ, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 15 September 2016

¹⁸ Mukhtiar Direktur BMT UMJ, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 15 September 2016

¹⁹ Mukhtiar Direktur BMT UMJ, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 15 September 2016

Produk dan Jasa Layanan

Penghimpunan Dana (Funding)

Tabungan dan Simpanan

- **Tabungan Mekkah**
(Manfaat Penuh Berkah)
 - ✓ BUNGKESMAS
 - ✓ SIMAPAN
 - ✓ SAHARA
 - ✓ SAPITRI
 - ✓ TAFAKUR
- **Deposito Madani**
(Mashlahat dalam berinvestasi)
 - ✓ 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan

Pembiayaan (Lending)

Jual Beli : Murobahah
Sewa jasa : Ijarah Multijasa
Kerjasama : Mudhorobah & Musyarokah
Pinjaman kebajikan : Al Qordh & Hiwalah

Jasa Layanan

Transfer antar Bank
Pembayaran Listrik (Prabayar&Pascabayar)
Pembayaran Telpnon
Pulsa Handphone
TV Berlangganan
PDAM & Paljaya
Tiket Pesawat, Kereta Api
Pembayaran Kartu kredit, dll.




Gambar. 4.4 Produk dan Jasa Layanan KSU BMT UMJ²⁰

Produk jasa dan layanan KSU BMT UMJ meliputi :

a. Simpanan Syariah

Tabungan manfaat penuh berkah merupakan layanan investasi, tabungan yang kami sediakan bagi anda sesuai dengan kebutuhan rencana keuangan dengan menggunakan prinsip wadiah atau murabahah, dana-dana anda akan kami investasikan ke berbagai bidang usaha yang halal dan toyiban sesuai dengan prinsip syariah

1) Simpan (Simpanan Masa Depan)

Tabungan syariah yang mudah penyetorannya, serta penarikannya yang dapat dilakukan selama jam buka kas di kantor KSU BMT UMJ.

Manfaat :

²⁰ Company profile KSU BMT UMJ

- Bagi hasil yang kompetitif.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Kemudahan dalam penyaluran zakat, infad dan shodaqoh.

Karakteristik:

- Berdasarkan dengan prinsip syariah dan akad mudharabah muthlaqoh.
- Minimum setoran awal RP. 20.000
- Minimum setoran selanjutnya RP. 10.000
- Bebas biaya administrasi bulanan

2) Sapitri (Simpanan Pendidikan Putra-putri)

Tabungan berjangka yang kami sediakan untuk perencanaan pendidikan putra dan putri anda dalam kepastian perencanaan target dana yang telah di tetapkan.

Manfaat:

- Aman dan terjamin.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Kemudahan rencana keuangan mitra untuk pendidikan .
- Jaminan pencapaian target dana.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dan akad mudharabah muthlaqoh
- Minimum setoran awal Rp. 50.000
- Minimum setoran selanjutnya Rp. 25.000

- Bebas biaya administrasi bulanan
- Hanya bisa di ambil setiap semester sekolah.
- Saldo tabungan tidak dapat diambil sewaktu- waktu apabila melakukan penarikan di luar waktu yang telah di tentukan maka akan di kenakan biaya administrasi.

3) Sahara (Simpanan Hari Raya)

Tabungan untuk persiapan hari raya idul fitri yang hanya dapat di tarik selama bulan ramadhan

Manfaat:

- Aman dan terjamin.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh.
- Kemudahan perencanaan dalam menyambut hari raya idul fitri.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dan akad mudharabah muthlaqoh.
- Minimum setoran awal Rp. 300.000
- Minimum setoran selanjutnya Rp. 20.000
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Hanya dapat diambil pada saat bulan ramadhan
- Saldo tabungan tidak dapat di tarik sewaktu-waktu apabila mitra melakukan penarikan akan dikenakan biaya administrasi.

4) Tafaqur (Tabungan Fasilitas Qurban).

Layanan jasa keuangan yang kami rancang khusus untuk anda, sesuai dengan perencanaan dalam memudahkan ibadah qurban anda untuk menggapai keridhaan Illahi.

Manfaat:

- Aman dan terjamin.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan shadaqah.
- Penawaran hewan qurban yang berkualitas dan harga bersaing.
- Adanya pelayanan antar hewan qurban pesanan sampai tujuan.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dan akad mudharabah muthlaqoh.
- Minimum setoran awal Rp. 100.000
- Minimum setoran selanjutnya Rp. 75.000
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Hanya dapat diambil pada bulan dzulhijah/ haji
- Saldo tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu, apabila mitra melakukan akan dikenakan biaya administrasi.

5) Deposito Madani

Layanan jasa tabungan yang kami rancang khusus untuk perencanaan dalam mempersiapkan pernikahan agar terwujud keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Manfaat:

- Dana aman dan terjamin.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Fasilitas *automatic roll over* (ARO).

Karakteristik:

- Jangka waktu yang flexibel 3,6 dan 12 bulan.
- Dicairkan pada saat jatuh tempo.
- Setoran deposito madani minimum Rp.1.000.000.
- Biaya materai Rp. 6.000

6) Tabungan Tawamah (Tabungan Walimah)

Layanan jasa tabungan yang kami rancang khusus untuk perencanaan dalam mempersiapkan pernikahan agar terwujud keluarga yang sakinah mwawadah warahmah.

Manfaat:

- Aman dan terjamin.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dan akad mudharabah muthlaqoh.
- Minimum setoran awal Rp. 250.000
- Minimum setoran selanjutnya Rp. 200.000
- Bebas biaya administrasi.

- Hanya akan diambil ketika akan menikah.
- Saldo tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu, apabila mitra melakukan akan dikenakan biaya administrasi.

7) Bungkesmas (Tabungan Kesehatan Masyarakat)

Layanan jasa tabungan plus asuransi kesehatan dan kecelakaan yang di desain khusus untuk meringankan kondisi keuangan mitra pada saat terkena musibah.

Manfaat:

- Santunan rawat inap rumah sakit, akibat sakit maupun kecelakaan.
- Penggantian biaya pembedahan/operasi akibat sakit maupun kecelakaan.
- Santunan meninggal dunia/cacat tetap akibat kecelakaan.
- Santunan pendapatan keluarga jika bertanggung meninggal dunia.
- Santunan pemakaman meninggal dunia akibat kecelakaan.

Karakteristik:

- Memiliki dana cadangan kesehatan.
- Memiliki dana cadangan pendidikan.
- Memiliki jaminan kesehatan dan kecelakaan selama stahun penuh.
- Premi sangat murah dan terjangkau.

Di harapkan dalam produk simpanan syariah anggota bisa merencanakan kebutuhan dan keperluannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Pembiayaan Syariah

1) Jual Beli (Murobahah)

- 2) Sewa Jasa (Ijarah Multi Jasa)
- 3) Kerjasama (Mudhorobah dan Musyarokah)
- 4) Pinjaman Kebajikan (Al Qordh dan Hiwalah)

KSU BMT UMJ dalam masalah pembiayaan juga menerapkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menganalisis pengajuan pembiayaan anggota dan mengadakan rapat internal dalam memutuskan pengajuan pembiayaan dari anggota. Analisis SOP yang dilakukan antara lain :

- 1) Staf Pemasaran

- Proses inisiasi

Merupakan analisa awal untuk penentuan anggota yang potensial anggota potensial tersebut dari :

- ❖ Anggota yang sudah mengajukan permohonan (lihat usaha pengajuan pembiayaan)
- ❖ Petugas/ pengelola KSU BMT UMJ yang melihat usaha-usaha anggota yang potensial untuk dikembangkan. Informasi anggota potensial didapat dari pengecekan item dari profil database KSU BMT UMJ disistem, maupun dari dat extreme seperti: referensi, customer anggota maupun supiler.

- Proses solitasi

Kunjunagn keanggota calon anggota pembiayaan dengan memerikasa informasi yang dibutuhkan:

- ❖ Data usaha

Filosofi usaha, sasaran ynag ingin dicapai, rencana jangka pendek, menengah dan panjang, para pendiri, pemegang saham, jumlah

kariawan, tingkat pendidikan kariawan, system penggajian, jaminan sosial dll

- ❖ Kemampuan membayar
- ❖ Barang yang akan dijamin

- Pembuatan laporan hasil survey

2) Staf pembiayaan

- Perisapan analisa

Pengumpulan informasi untuk persiapan analisa. Baik yang bersifat umum, (reputasi, dan ekonomi dll), maupun data yang bersifat khusus (yuridis, keuangan, teknis manajemen dll) Penetapan titik kritis proyek yang dibiayai. Merupakan penentuan aspek mana yang paling kritis untuk dianalisa yang merupakan faktor dominan untuk keberhasilan proyek.

- Analisa setiap aspek

Setelah mengetahui titik kritis, maka analisa dapat dilanjutkan ke setiap aspek calon debitur seperti aspek :

- ❖ Aspek yuridis: Setatus badan usaha dan kapasitas calon pembiayaan secara hukum.
- ❖ Aspek pemasaran: Siklus hidup produksi, produk substitusi, kompetitor, daya beli masyarakat, program promosi, daerah pemasaran, faktor musim, menejemen pemasaran, kontrak penjualan.
- ❖ Aspek teknis: Lokasi usaha, fasilitas, mesin-mesin, proses produksi efisiensi.

- ❖ Aspek jaminan: Untuk mengetahui nilai ekonomis jaminan dan nilai yuridis dari barang yang dijamin.
- Analisa kualitatif Analisa kualitatif menekankan kepada aspek kemauan membayar dari nasabah.hal ini mencakup karakter/ watak dan komitmen dari anggota KSU BMT UMJ.
- Analisis kuantitatif Merupakan analisa untuk menilai kemampuan membayar dari calon debitur. Pendekatan yang dipakai adalah:
 - ❖ Pendekatan pendapatan bersih
 - ❖ Pendekatan kemampuan menabung
 - ❖ Pendekatan kebutuhan modal

c. Pendampingan

Bagian Pendampingan mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk – produk pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerjanya. Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampingan adalah :

1) Pendampingan Manajemen Usaha

Kebanyakan anggota di sektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen usaha. Oleh karena itu perlu diberikan asistensi tentang manajemen usaha yang baik, diantaranya :

- Pembukuan sederhana
- Manajemen keuangan sederhana
- Manajemen pemasaran

- Pendampingan Permodalan

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penumbuhan usaha anggota adalah disisi permodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

2) Pendampingan Pemasaran

Dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk – produk mereka ke pihak – pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kualitas produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar di pasaran tidak ketinggalan dengan produk – produk lain.

3) Pendampingan Jaringan Usaha

Melalui jaringan usaha (Networking) khususnya jaringan usaha antar anggota diharapkan mereka mampu mengelola usahanya dengan baik, agar tidak kalah dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha.

3. Strategi KSU BMT UMJ memberdayakan UMKM

Karakteristik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep ini meliputi ciri atau karakter pemberdayaan yang berdasarkan tiga hal utama yang bersifat adaptif terhadap masyarakat, yaitu:²¹

- a. Berbasis masyarakat (*community based*), artinya masyarakat bertindak sebagai pelaku/subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pemberdayaan ekonomi. Masyarakat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang kegiatan yang diperlukan serta pelaksanaannya. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama (*selective decision*).
- b. Berbasis sumber daya setempat (*local resources based*) artinya program ini didasarkan pada sumber-sumber yang tersedia pada daerah tersebut.
- c. Berbasis kelanjutan (*sustainable*) artinya program yang dirancang harus dapat berfungsi sebagai motor penggerak awal, tidak berhenti pada akhir suatu program. Agar hal tersebut dapat tercapai diperlukan strategi, perencanaan dan pelaksanaan yang tepat guna.

Motivasi KSU BMT UMJ memajukan UMKM untuk meningkatkan kapasitas kemampuan UMKM lebih kuat sehingga membawa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya UMKM.²²

²¹ Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, h. 227

²² Mukhtiar Direktur BMT UMJ, *Wawancara Pribadi*, Ciputat, 15 September 2016

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Peran KSU BMT UMJ

Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wat Tamwil UMJ Terhadap UMKM dari hasil analisis yang terjadi bahwa dari program pelaksanaan BMT UMJ dalam peranannya yaitu: Pembiayaan usaha dan Pembinaan Anggota.

Dalam pembiayaan usaha, pedagang kecil ataupun masyarakat menengah ke bawah dalam memperoleh dana pembiayaan untuk memperluas usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat menengah ke bawah relatif sangat sulit, maka KSU BMT UMJ mampu menjangkanya untuk memperoleh pembiayaan yang diberikan oleh BMT tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaannya.

Selanjutnya dalam pembinaan, pedagang kecil dan masyarakat menengah ke bawah dalam melakukan usahanya dan agar mampu bersaing dengan adanya kompetitor dari dalam maupun luar negeri, maka KSU BMT UMJ seringkali memberikan pembinaan kewirausahaan maupun pengelolaan keuangan.

Dalam beberapa program-program kegiatan tersebut secara tidak langsung dapat membentuk anggota binaan dalam meningkatkan kinerja pengembangan usahanya.

Dampak terhadap KSU BMT UMJ dan UMKM binaan KSU BMT UMJ. dapat dilihat dari dua aspek yaitu, aspek *material* dan *immaterial*.

a. Aspek material

Yaitu dengan mendapatkan keuntungan yang layak bagi pihak KSU BMT UMJ, semua itu dapat dilihat dari program-program yang dikeluarkan K S U BMT UMJ dan kinerjanya.

b. Aspek immaterial

Yaitu dengan adanya program pembinaan anggota binaan mendapat wawasan keilmuan dalam berbisnis serta upgrading bisnis secara mandiri.

Dengan adanya kesimpulan ini agar tujuan peran K S U BMT UMJ ini kedepannya bisa dapat membantu menciptakan perilaku bermuamalah yang baik dan dapat menciptakan daya saing di dalam maupun luar negeri.

2. Produk-produk KSU BMT UMJ

Produk dan jasa layanan pendukung pemberdayaan UMKM di KSU BMT UMJ meliputi simpanan syariah dan pembiayaan syariah, dimana produk dan jasa layanan tersebut sebagai fasilitator pendukung aktivitas UMKM dalam melakukan kegiatan bisnis usaha yang dijalankan. Kemudahan yang ditawarkan dirasa sangat bermanfaat bagi pelaku usaha dalam mempermudah kegiatan usahanya dan juga bertujuan memajukan ekonomi umat. Kemudahan yang ditawarkan salah satunya yakni transaksi via internet, dimana fasilitas tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien.

3. Strategi KSU BMT UMJ memberdayakan UMKM

Dalam meningkatkan kinerja UMKM dalam pengembangan usahanya perlu adanya peningkatan mutu serta daya saing dalam diri UMKM. Maka dari itu KSU BMT UMJ memberikan program binaan UMKM anggota KSU BMT UMJ yang dalam pembinaannya dari segi edukasi dan keterampilan SDM

serta pembekalan jiwa entrepreneurship di berikan dalam kegiatan pembinaan tersebut. Hal tersebut di rasa cukup untuk menghadapi pasar bebas ASEAN dimana UMKM di motivasi untuk kreatif dan inovatif dalam menjalankan usahanya.

B. Rekomendasi

Berangkat dari realitas yang dipaparkan dalam kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Kepada KSU BMT UMJ agar lebih meluaskan informasinya dan mengembangkan kegiatan-kegiatan pembinaan secara continue agar dapat menciptakan peluang-peluang baru dalam kegiatan bisnis ekonomi.
2. Produk dan jasa layanan pemberdayaan UMKM anggota KSU BMT UMJ juga harus memperhatikan kebutuhan persaingan global mulai dari akses dan pemanfaatannya.
3. KSU BMT UMJ diharapkan dapat melihat potensi-potensi risiko yang ada dari dalam maupun luar negeri yang secara tidak langsung dampaknya akan terasa bagi UMKM maupun pedagang kecil menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Euis. 2008 *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arief Sritua. 1997 *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Cetakan I Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA (Institut of Development and Economic Analisis)
- Arif Subhan, ed., Jurnal Vol. 9 No.2 2014 : *Peranan Dosen IAIN Raden Intan Lampung dalam Pemberdayaan melalui Pengabdian Masyarakat di Kec. Sukarame Bandar Lampung*. (Lampung: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, 2014).
- Arminda Yolanda Ryan. "Ini Solusi Atasi Efek Negatif Pasar Bebas ASEAN," *Tempo*, Jum^a at 15 Agustus 2014
- Baitul Maal Wa Tamwil UMJ. 2015 *Company profile KSU BMT UMJ*, Jakarta.
- Burhan Bungin, " *Tehnik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial* " dalam Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).
- Chapra. 1999 *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer* Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti dan IIIT-Malaysia
- Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memeberdayakan Rakyat:Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* Bandung: PT refika Aditama
- Fatimah Siti. 2013. *Masyarakat Berdaya: Jurnal Kajian Islam dan Pemberdayaan Masyarakat* Surabaya: PMI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel
- <http://blog-pelajaransekolah.blogspot.com/2013/12/ciri-ciri-sistem-ekonomi-pasar-bebas.html/>

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/03/29/5-hal-yang-mesti> dibenahi-
menghadapi-afta-2015-64324/

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_30.htm

International Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1

Jamal Lulail Yunus. 2009. *Manajemen Bank Syariah* Malang: UIN-Malang Press

Moeloeng Lexy J. 2002 *Metode Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosyada Karya

Muhammad Ali Daud. 1998. *Sistem Indonesia Islam Zakat dan Wakaf* Jakarta: UI
Press

Muhammad Syafi'i Antonio. 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta:
Gema Insani Press

Muhammad. 1998. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* Yogyakarta:
STIS

Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Safe'i. 2001 *Pengembangan Masyarakat
Islam* Bandung: Remaja Rosdakarya

Prabowo, Hendro dan Wardoyo. 2003. *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi
Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Wilayah Jabotabek.*
Depok : Universitas Gunadarma

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, "Strategi
Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN," Badan
Kebijakan Fiskal, Selasa, 31 Desember 2013

Qardhani Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* Jakarta: Gema
Insani Press

Rukminto Adi Ismandi. 2002. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan
Intervensi Komunitas* Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI

STAIN, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Tarbiyah*, Ponorogo: Lembaga
Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN, 2002.

Sudarsono Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan
Ilustrasi*, (Edisi Kedua) Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi
UII

Sudaryanto. 2011. *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to
Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in
East Java Farm Agribusiness.*

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* Jakarta: Alfabeta

Sukarmi. 2002. *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*
Jakarta: Sinar Grafika

Sumodiningrat Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat Yogyakarta*:
Pustaka Pelajar

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Jakarta: CV. Eko Jaya

Wangke Humphrey. 2014. "Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi
ASEAN 2015," *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*,
10 Mei 2016

Wihatnolo R.R dan Dwidjowijoto R.N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan:
Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta:
Gramedia

www.bmtuniversitasmuhammadiyahjakarta.blogspot.com/tanggal7/jam10

Lampiran I

Tabungan

Produk dana & Jasa

Layanan syariah untuk seluruh kebutuhan finansial anda

KOPERASI BMT - UMI

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

KSU BMT - UMI
Universitas Muhammadiyah Jakarta

TABUNGAN MANFAAT PENUH BERKAH

Tabungan merupakan layanan investasi, tabungan yang kami sediakan bagi anda sesuai dengan kebutuhan perencanaan keuangan. Dengan menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah, dana anda akan kami investasikan ke berbagai bidang usaha yang halal dan thayyiban sesuai dengan prinsip syariah.

SIMPANAN

Simpanan Masa Depan

Tabungan syariah yang mudah penyeterannya, serta penarikannya yang dapat dilakukan selama jam buka kas di kantor KSU BMT-UMU.

Manfaat

- Bagi hasil yang kompetitif
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan*
- Kemudahan dalam peryaluran zakat, infaq dan shodaqoh

Karakteristik

- Berdasarkan prinsip syariah dan akad mudharabah muthlaqoh
- Minimum setoran awal Rp. 20.000,-
- Minimum setoran selanjutnya Rp. 10.000,-
- Bebas biaya administrasi bulanan

Deposito Madani

Maslahat dalam berinvestasi

Layanan jasa tabungan yang kami rancang khusus untuk perencanaan dalam mempersiapkan pernikahan agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Manfaat

- Dana aman dan terjamin dan di kelola secara syariah
- Bagi hasil yang kompetitif
- Dapat di jadikan jaminan pembiayaan*
- Fasilitas Automatic Roll Over (ARO)

Karakteristik

- Jangka waktu yang flexibel : 3,6 dan 12 bulan
- Dicairkan pada saat jatuh tempo
- Setoran deposito minimum Rp. 1.000.000,-
- Biaya materai Rp. 6000,-

Informasi Lebih lanjut :

KSU BMT - UMI
Komplek Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Achmad Dahlan Cirebon, Ciputat
Telp. 021-747 06 220
085102425400

SAPITRI

Simpanan Pendidikan Putra-Putri

Tabungan berjangka yang kami sediakan untuk perencanaan pendidikan putra putri anda dalam kepastian pencapaian target dana yang telah di tetapkan.

Manfaat

- Aman dan terjamin
- Bagi hasil yang kompetitif
- Dapat di jadikan jaminan pembiayaan*
- Kemudahan perencanaan keuangan mitra untuk pendidikan
- Jaminan pencapaian target dana

Karakteristik

- Berdasarkan prinsip syariah dan akad mudharabah muthlaqoh
- Minimum setoran awal Rp. 50.000,-
- Minimum setoran selanjutnya Rp. 25.000,-
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Hanya dapat di ambil setiap semester sekolah
- Saldo tabungan tidak dapat di tarik sewaktu-waktu. Apabila itra melakukan penarikan di luar waktu yang telah di tentukan, maka akan di kenakan biaya administrasi

SAHARA

Simpanan Hari Raya



Tabungan untuk persiapan menyambut hari raya Idul Fitri yang hanya dapat di tarik selama bulan Ramadhan.

Manfaat

- Aman dan tejamin
- Bagi hasil yang kompetitif
- Dapat di jadikan jaminan pebiayaan*
- Kemudahan dalam penyuluran zakat, Infaq dan shodaqoh
- Kemudahan perencanaan dalam menyambut hari raya Idul Fitri

Karakteristik

- Berdasarkan prinsip syariah dan akad mudharabah muthlaqoh
- Minimum setoran awal Rp.300.000,-
- Minimum setoran selanjutnya Rp. 20.000,-
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Hanya dapat diambil pada saat bulan Ramadhan
- Saldo tabungan tidak dapat di tarik sewaktu-waktu. Apabila Mitra melakukan akan di kenakan biaya administrasi

TAFAGUR

Tabungan Fasilitas Qurban



Layanan jasa tabungan yang kami rancang khusus untuk anda, sesuai dengan perencanaan dalam memudahkan ibadah qurban anda untuk menggapai kerhidoan lahi.

Manfaat

- Aman dan tejamin
- Bagi hasil yang kompetitif
- Dapat di jadikan jaminan pebiayaan*
- Kemudahan dalam penyuluran zakat, Infaq dan shodaqoh
- Penawaran hewan qurban yang berkualitas dengan harga bersaing
- Adanya pelayanan antar hewan qurban pesanan sampai tujuan*

Karakteristik

- Berdasarkan prinsip syariah dan akad mudharabah muthlaqoh
- Minimum setoran awal Rp.100.000,-
- Minimum setoran selanjutnya Rp. 75.000,-
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Hanya dapat diambil pada saat bulan Dzuhjahan (bulan Haji)
- Saldo tabungan tidak dapat di tarik sewaktu-waktu. Apabila Mitra melakukan akan di kenakan biaya administrasi

TAWAMAH

Tabungan Walimah



Layanan jasa tabungan yang kami rancang khusus untuk perencanaan dalam mempersiapkan pernikahan agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Manfaat

- Aman dan tejamin
- Bagi hasil yang kompetitif
- Dapat di jadikan jaminan pebiayaan*

Karakteristik

- Berdasarkan prinsip syariah dan akad mudharabah muthlaqoh
- Minimum setoran awal Rp.250.000,-
- Minimum setoran selanjutnya Rp. 200.000,-
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Hanya dapat diambil ketika akan menikah
- Saldo tabungan tidak dapat di tarik sewaktu-waktu. Apabila Mitra melakukan akan di kenakan biaya administrasi

BUNGKESMAS

Tabungan Kesehatan Masyarakat



Layanan jasa tabungan plus asuransi kesehatan dan kecelakaan yang di desain khusus untuk meringankan kondisi keuangan mitra pada saat terkena musibah

Manfaat

- Santunan rawat inap rumah sakit,akibat sakit maupun kecelakaan*
- Pergantian biaya pembedahan/operasi, akibat sakit maupun kecelakaan*
- Santunan meninggal dunia/cacat tetap akibat kecelakaan*
- Santunan pendapatan keluarga jika tertanggung meninggal dunia*
- Santunan pemakaman meninggal dunia akibat kecelakaan*

Karakteristik

- Memiliki dana cadangan kesehatan
- Memiliki dana cadangan pendidikan
- Memiliki jaminan kesehatan dan kecelakaan selama satu tahun penuh
- Premi sangat murah dan terjangkau